

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Bank menurut Undang-undang perbankan dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan LKBB merupakan lembaga pembiayaan yang dalam kegiatan usahanya tidak melakukan penghimpunan dana dan memberikan jasa.

Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara, karena memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara pemilik modal (*fund supplier*) dengan pengguna dana (*fund user*). Aspek kredit dan perkreditan memang menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari dunia perbankan. Secara konseptual, keduanya saling bertautan antara satu sama lain. Bank, dalam hal ini memang memiliki kewajiban untuk menyalurkan kembali dana yang terhimpun dari masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit atau pinjaman. Bagi perbankan, pemberian fasilitas kredit masih menjadi lahan

tersendiri yang menjanjikan. Dalam kancah perekonomian nasional, penyaluran kredit oleh bank umum, dari tahun ke tahun telah menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional mulai berangsur-angsur membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan dana pihak ketiga yang pada akhirnya dapat memicu kecepatan ekspansi kredit bank, sebenarnya bukan tidak mungkin mengandung resiko tinggi (*high risk*). Dalam perjalanannya, kredit yang telah tersalurkan terkadang memang tidak sesuai dengan harapan. Realitanya, masih saja ditemukan adanya kredit macet (*non-performing loan/NPL*). Terhambatnya arus pengembalian kredit akan berdampak buruk terhadap kemampuan bank dalam memperoleh laba usahanya, karena kontribusi pendapatan bunga bagi bank adalah hal yang utama. Melalui usaha pemberian kredit inilah bank dapat menambah perolehan labanya. Ini memang sudah menjadi resiko bisnis bank. Namun jika persentase kredit bermasalah tersebut melebihi dari ketentuan batas maksimum yang berlaku, tentu saja hal ini akan berdampak pada stabilitas dan kontinuitas usaha bank itu sendiri.

Setelah di tahun 1997 krisis moneter memporak-porandakan perbankan nasional, kembali di tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang juga berdampak terhadap sektor perbankan nasional. Terjadinya krisis keuangan global mengakibatkan tingginya tingkat inflasi. Bank Indonesia menyikapi tingginya tingkat inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dengan kondisi seperti ini, perbankan cenderung sangat lambat dalam menyalurkan kredit. Pada akhirnya, industri dalam negeri akan kesulitan berproduksi dan kondisi

bertambah berat jika bank-bank juga untuk sementara menghentikan pemberian kredit melihat situasi yang kurang kondusif. Kemungkinan terburuk adalah ketidakmampuan industri untuk mengembalikan cicilan hutang kepada bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan kredit bermasalah bank. Pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi juga akan terhambat.

Dilihat dari struktur aset bank, kredit atau pinjaman merupakan aktiva produktif terbesar sehingga pendapatan bunga yang diperoleh bank dari penyaluran kredit ini merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh bank. Tapi karena sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit tersebut berasal dari pihak ketiga maka besarnya pendapatan tersebut akan diikuti pula dengan besarnya beban bunga yang harus dibayar kepada nasabah. Oleh karena itu, pihak bank harus dapat menentukan besarnya tingkat bunga yang paling efektif dan memperhatikan resiko yang ada sehingga kredit yang disalurkan dapat menghasilkan laba yang sebesar-besarnya.

Sebagai salah satu elemen penggerak perekonomian, perbankan memegang peranan yang penting. Terjadinya krisis keuangan global tentunya berpengaruh terhadap kegiatan operasional perbankan, terutama berkaitan dengan penyaluran kredit perbankan.

Realisasi pemberian kredit baru di tahun 2008 memang terlihat mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan kredit yang dicapai sepanjang tahun 2008 sebesar 26%. Namun nominal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi kredit perbankan sepanjang triwulan pertama sebesar 29,8%. Bank Indonesia memandang bahwa dampak krisis global pada melambatnya pertumbuhan kredit mulai tampak pada triwulan III-2008 dan akan semakin

terlihat pada tahun 2009.

Memasuki triwulan IV-2008, perbankan mulai kesulitan memperluas basis pendapatan dari kredit karena ekspansi pinjaman berjalan lambat. Padahal, penyaluran kredit merupakan sumber utama pendapatan perbankan. Rendahnya penyaluran kredit terjadi seiring dengan menurunnya permintaan dari sektor riil. Selain itu, perbankan juga sangat berhati-hati melakukan ekspansi karena khawatir rasio kredit bermasalah meningkat. Sejak Juni hingga Oktober 2008 rasio kredit bermasalah telah mengalami peningkatan sebesar 7,25%. Per Desember 2008 rasio kredit bermasalah memang mengalami penurunan. Namun di tahun 2009 rasio kredit bermasalah diperkirakan akan jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Akibatnya, operasional bank makin merugi karena bank harus lebih banyak menyisihkan pencadangan aktiva produktif seiring dengan meningkatnya kredit bermasalah sehingga kemampuan bank dalam memberikan kredit menjadi terbatas.

Belum berjalannya fungsi intermediasi dari perbankan dengan optimal. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan adanya resiko-resiko yang dihadapi perbankan seperti: resiko kredit, resiko suku bunga, dan resiko likuiditas.

Resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko suku bunga terjadi manakala bank menerima simpanan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan tingkat bunga yang tinggi kemudian tingkat bunga mengalami penurunan yang drastis. Resiko timbul akibat bank memiliki biaya dana yang relatif tinggi yang pada gilirannya menyebabkan bank tersebut tidak

kompetitif. Resiko likuiditas adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.

Sebagai upaya untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global terhadap sektor perbankan, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain kebijakan pengamanan likuiditas. Dalam kebijakan ini pemerintah akan menyediakan pasokan valas bagi korporasi, menurunkan rasio Giro Wajib Minimum valas dari 3% menjadi 1%, pencabutan pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/2005 tentang batasan Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek, penyederhanaan perhitungan Giro Wajib Minimum rupiah 7,5% dari Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari 5% Giro Wajib Minimum utama dan 2,5% Giro Wajib Minimum sekunder.

Kebijakan yang cukup melegakan nasabah bank adalah dinaikkannya jaminan dana nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang menurut Menteri Keuangan sudah mencakup 90% dana pihak ketiga dan 97% rekening nasabah.

Bank yang kesulitan likuiditas dapat memperoleh fasilitas pembiayaan darurat (FPD) dari BI yang dijamin pemerintah dan BI berhak mengganti pengurus bank yang mendapat FPD. Pemerintah juga memberi insentif bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) mengakuisisi bank atau LKBB lain.

Di sini nampak terlihat bahwa pemerintah telah belajar dari krisis di tahun 1997. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi pemerintah melakukan pemagaran yang sangat rapat sehingga serangan terhadap sektor finansial dan

ekonomi dapat diminimalkan. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak mau bersantai-santai sambil menunggu gejala internasional mereda, namun terus memantau dan mengantisipasi dengan mengeluarkan kebijakan lanjutan untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya.

Adanya perkembangan penurunan BI *rate* diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan, yang akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan. Kondisi seperti ini yang diharapkan akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial. Yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi nasional pada khususnya.

Dengan mengetahui kondisi ekonomi yang sedang terjadi, dapat membantu manajemen perbankan dalam menentukan arah kebijakan dalam penyaluran kredit, sehingga bank tidak secara sembarangan dalam melakukan ekspansi kredit hanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Pihak perbankan diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit pada sektor-sektor yang diperkirakan akan rentan terhadap krisis keuangan global dan selalu memantau perkembangan kredit yang telah disalurkan. Dengan manajemen resiko yang baik, diharapkan perbankan dapat meminimalkan dampak negatif dari krisis keuangan global. Pihak perbankan juga diharapkan tidak terlalu membatasi kredit hanya untuk menghindari resiko. Sehingga dapat diketahui kaitan antara pemberian kredit dengan profitabilitas. Untuk itulah penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai hubungan antara jumlah pemberian kredit dengan profitabilitas yang terjadi pada bank-bank umum swasta di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profitabilitas bank adalah sebagai berikut:

1. Kinerja manajemen bank yang belum optimal.
2. Kondisi keuangan global yang tidak stabil.
3. Tingkat inflasi yang tinggi.
4. Menurunnya tingkat pemberian kredit.
5. Meningkatnya kredit bermasalah.
6. Meningkatnya beban operasional akibat pencadangan aktiva produktif.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada hubungan antara jumlah pemberian kredit dengan *return on assets* (ROA).

Jumlah pemberian kredit menunjukkan seberapa besar dana yang disalurkan bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan (debitur). Jumlah pemberian kredit dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana - dana pihak ketiga yang dihimpun bank.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas pada dasarnya laba (keuntungan) yang dinyatakan dalam persentase profit. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva disebut dengan ROA.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : ”Apakah terdapat hubungan antara jumlah pemberian kredit dengan profitabilitas pada bank-bank umum swasta di Indonesia ?”.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, berguna untuk menambah wawasan berfikir dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan, serta menambah pengalaman untuk mengadakan penelitian berikutnya.
2. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dalam penyaluran kredit.
4. Bagi perguruan tinggi, dapat menambah khasanah karya ilmiah di Universitas Negeri Jakarta untuk dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.